



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 298 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/994/M.SM.02.00/2024 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Pengawas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1424/M.SM.02.00/2024 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia maka Keputusan Jaksa Agung Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan kelas jabatan untuk jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KEDUA : Pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai yang mengalami kenaikan kelas jabatan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung ini terhitung sejak Keputusan Jaksa Agung ini ditetapkan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Jaksa Agung ini berlaku, Keputusan Jaksa Agung Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Jaksa Agung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 298 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KELAS JABATAN PEGAWAI PADA JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NO		NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1		2	3
I		JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI	
A		JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA	
	1.	Wakil Jaksa Agung	18
	2.	Jaksa Agung Muda Pembinaan	17
	3.	Jaksa Agung Muda Intelijen	
	4.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	
	5.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	
	6.	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	
	7.	Jaksa Agung Muda Pidana Militer	
	8.	Jaksa Agung Muda Pengawasan	
	9.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan	
	10.	Kepala Badan Pemulihan Aset	
	11.	Staf Ahli	16
B		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
	1.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	15
	2.	Kepala Biro Perencanaan	
	3.	Kepala Biro Umum	
	4.	Kepala Biro Kepegawaian	
	5.	Kepala Biro Keuangan	
	6.	Kepala Biro Perlengkapan	
	7.	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri	
	8.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	

NO		NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1		2	3
	9.	Direktur I	15
	10.	Direktur II	
	11.	Direktur III	
	12.	Direktur IV	
	13.	Direktur V	
	14.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	
	15.	Direktur A	
	16.	Direktur B	
	17.	Direktur C	
	18.	Direktur D	
	19.	Direktur E	
	20.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	
	21.	Direktur Penyidikan	
	22.	Direktur Penuntutan (Tindak Pidana Khusus)	
	23.	Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (Tindak Pidana Khusus)	
	24.	Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	
	25.	Direktur Pengendalian Operasi	
	26.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	
	27.	Direktur Perdata	
	28.	Direktur Tata Usaha Negara	
	29.	Direktur Pertimbangan Hukum	
	30.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer	
	31.	Direktur Penindakan	
	32.	Direktur Penuntutan (Pidana Militer)	
	33.	Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi (Pidana Militer)	
	34.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	
	35.	Inspektur I	
	36.	Inspektur II	

NO		NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1		2	3
	37.	Inspektur III	15
	38.	Inspektur Keuangan I	
	39.	Inspektur Keuangan II	
	40.	Inspektur Keuangan III	
	41.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan	
	42.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	
	43.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	
	44.	Sekretaris Badan Pemulihan Aset	
	45.	Kepala Pusat Manajemen, Penelusuran, dan Perampasan Aset	
	46.	Kepala Pusat Penyelesaian Aset	
	47.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	
	48.	Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	
	49.	Kepala Pusat Penerangan Hukum	
	50.	Kepala Pusat Kesehatan Yustisial	
	51.	Kepala Kejaksaan Tinggi	
	52.	Asisten Umum Jaksa Agung	14
	53.	Asisten Khusus Jaksa Agung	
	54.	Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	
	55.	Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	
	56.	Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	
	57.	Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	
	58.	Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer	
	59.	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi	
C		JABATAN ADMINISTRATOR	
	1.	Kepala Kejaksaan Negeri	13
	2.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Pembinaan)	
	3.	Kepala Bagian Tata Usaha (Pembinaan)	
	4.	Kepala Bagian Pengelolaan Data (Biro Perencanaan)	

NO		NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1		2	3
	5.	Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja (Biro Perencanaan)	13
	6.	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi (Biro Perencanaan)	
	7.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Biro Perencanaan)	
	8.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi (Biro Perencanaan)	
	9.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan (Biro Umum)	
	10.	Kepala Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan (Biro Umum)	
	11.	Kepala Bagian Keamanan (Biro Umum)	
	12.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan (Biro Umum)	
	13.	Kepala Bagian Prasarana, Sarana, dan Rumah Tangga (Biro Umum)	
	14.	Kepala Bagian Umum (Biro Kepegawaian)	
	15.	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai (Biro Kepegawaian)	
	16.	Kepala Bagian Kepangkatan dan Mutasi (Biro Kepegawaian)	
	17.	Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun (Biro Kepegawaian)	
	18.	Kepala Bagian Perbendaharaan (Biro Keuangan)	
	19.	Kepala Bagian Pendapatan dan Piutang Negara (Biro Keuangan)	
	20.	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Biro Keuangan)	
	21.	Kepala Bagian Umum Keuangan (Biro Keuangan)	
	22.	Kepala Bagian Analisis Kebutuhan (Biro Perlengkapan)	
	23.	Kepala Bagian Pengadaan (Biro Perlengkapan)	
	24.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (Biro Perlengkapan)	
	25.	Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
	26.	Kepala Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
	27.	Kepala Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
	28.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Intelijen)	
	29.	Kepala Bagian Tata Usaha (Intelijen)	
	30.	Kepala Bagian Keuangan (Intelijen)	
	31.	Kepala Subdirektorat I.A (Direktorat I)	

NO		NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1		2	3
	32.	Kepala Subdirektorat I.B (Direktorat I)	13
	33.	Kepala Subdirektorat I.C (Direktorat I)	
	34.	Kepala Subdirektorat I.D (Direktorat I)	
	35.	Kepala Subdirektorat II.A (Direktorat II)	
	36.	Kepala Subdirektorat II.B (Direktorat II)	
	37.	Kepala Subdirektorat II.C (Direktorat II)	
	38.	Kepala Subdirektorat II.D (Direktorat II)	
	39.	Kepala Subdirektorat III.A (Direktorat III)	
	40.	Kepala Subdirektorat III.B (Direktorat III)	
	41.	Kepala Subdirektorat III.C (Direktorat III)	
	42.	Kepala Subdirektorat III.D (Direktorat III)	
	43.	Kepala Subdirektorat IV.A (Direktorat IV)	
	44.	Kepala Subdirektorat IV.B (Direktorat IV)	
	45.	Kepala Subdirektorat IV.C (Direktorat IV)	
	46.	Kepala Subdirektorat IV.D (Direktorat IV)	
	47.	Kepala Subdirektorat V.A (Direktorat V)	
	48.	Kepala Subdirektorat V.B (Direktorat V)	
	49.	Kepala Subdirektorat V.C (Direktorat V)	
	50.	Kepala Subdirektorat V.D (Direktorat V)	
	51.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Tindak Pidana Umum)	
	52.	Kepala Bagian Tata Usaha (Tindak Pidana Umum)	
	53.	Kepala Bagian Keuangan (Tindak Pidana Umum)	
	54.	Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Direktorat A)	
	55.	Kepala Subdirektorat Penuntutan (Direktorat A)	
	56.	Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi (Direktorat A)	
	57.	Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Direktorat B)	
	58.	Kepala Subdirektorat Penuntutan (Direktorat B)	
	59.	Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi (Direktorat B)	
	60.	Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Direktorat C)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
61.	Kepala Subdirektorat Penuntutan (Direktorat C)	13
	62. Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi (Direktorat C)	
	63. Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Direktorat D)	
	64. Kepala Subdirektorat Penuntutan (Direktorat D)	
	65. Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi (Direktorat D)	
	66. Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Direktorat E)	
	67. Kepala Subdirektorat Penuntutan (Direktorat E)	
	68. Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi (Direktorat E)	
	69. Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Tindak Pidana Khusus)	
	70. Kepala Bagian Tata Usaha (Tindak Pidana Khusus)	
	71. Kepala Bagian Keuangan (Tindak Pidana Khusus)	
	72. Kepala Subdirektorat Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Penyidikan)	
	73. Kepala Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Penyidikan)	
	74. Kepala Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Penyidikan)	
	75. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Penuntutan)	
	76. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Penuntutan)	
	77. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Penuntutan)	
	78. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Uheksi)	
	79. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Uheksi)	
	80. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Uheksi)	
	81. Kepala Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Direktorat HAM Berat)	
	82. Kepala Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Direktorat HAM Berat)	
	83. Kepala Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Direktorat HAM Berat)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
84.	Kepala Subdirektorat Bantuan Teknis dan Tindakan Hukum Lain (Direktorat Pengendalian Operasi)	13
85.	Kepala Subdirektorat Layanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (Direktorat Pengendalian Operasi)	
86.	Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi (Direktorat Pengendalian Operasi)	
87.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
88.	Kepala Bagian Tata Usaha (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
89.	Kepala Bagian Keuangan (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
90.	Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Penyelamatan (Direktorat Perdata)	
91.	Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Pemulihan (Direktorat Perdata)	
92.	Kepala Subdirektorat Arbitrase (Direktorat Perdata)	
93.	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum (Direktorat Perdata)	
94.	Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Tata Usaha Negara (Direktorat Tata Usaha Negara)	
95.	Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Pemerintahan (Direktorat Tata Usaha Negara)	
96.	Kepala Subdirektorat Uji Materiil (Direktorat Tata Usaha Negara)	
97.	Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum (Direktorat Tata Usaha Negara)	
98.	Kepala Subdirektorat Pendapat Hukum (Direktorat Pertimbangan Hukum)	
99.	Kepala Subdirektorat Pendampingan dan Audit Hukum (Direktorat Pertimbangan Hukum)	
100.	Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum (Direktorat Pertimbangan Hukum)	
101.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Pidana Militer)	
102.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Pengamanan dan Pengawasan (Pidana Militer)	
103.	Kepala Bagian Keuangan (Pidana Militer)	
104.	Kepala Subdirektorat Penindakan Perkara Koneksitas (Direktorat Penindakan)	
105.	Kepala Subdirektorat Koordinasi Penindakan (Direktorat Penindakan)	
106.	Kepala Subdirektorat Penuntutan Perkara Koneksitas (Direktorat Penuntutan)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
107.	Kepala Subdirektorat Koordinasi Penuntutan (Direktorat Penuntutan)	13
108.	Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas (Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi)	
109.	Kepala Subdirektorat Koordinasi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi (Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi)	
110.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Pengawasan)	
111.	Kepala Bagian Tata Usaha (Pengawasan)	
112.	Kepala Bagian Keuangan (Pengawasan)	
113.	Kepala Bagian Pengendalian Birokrasi dan Aparatur Kejaksaan (Pengawasan)	
114.	Inspektur Muda Kepegawaian, Pemulihan Aset, dan Tugas Umum (Inspektorat I)	
115.	Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (Inspektorat I)	
116.	Inspektur Muda Intelijen, Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer (Inspektorat I)	
117.	Inspektur Muda Kepegawaian, Pemulihan Aset dan Tugas Umum (Inspektorat II)	
118.	Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (Inspektorat II)	
119.	Inspektur Muda Intelijen, Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer (Inspektorat II)	
120.	Inspektur Muda Kepegawaian, Pemulihan Aset dan Tugas Umum (Inspektorat III)	
121.	Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (Inspektorat III)	
122.	Inspektur Muda Intelijen, Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer (Inspektorat III)	
123.	Inspektur Muda Keuangan I (Inspektorat Keuangan I)	
124.	Inspektur Muda Keuangan II (Inspektorat Keuangan I)	
125.	Inspektur Muda Keuangan III (Inspektorat Keuangan I)	
126.	Inspektur Muda Keuangan I (Inspektorat Keuangan II)	
127.	Inspektur Muda Keuangan II (Inspektorat Keuangan II)	
128.	Inspektur Muda Keuangan III (Inspektorat Keuangan II)	
129.	Inspektur Muda Keuangan I (Inspektorat Keuangan III)	
130.	Inspektur Muda Keuangan II (Inspektorat Keuangan III)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
131.	Inspektur Muda Keuangan III (Inspektorat Keuangan III)	13
132.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
133.	Kepala Bagian Tata Usaha (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
134.	Kepala Bagian Keuangan (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
135.	Kepala Bidang Program dan Evaluasi (Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat)	
136.	Kepala Bidang Penyelenggaraan (Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat)	
137.	Kepala Bidang Program dan Evaluasi (Pusat Diklat Teknis Fungsional pada Badiklat)	
138.	Kepala Bidang Penyelenggaraan (Pusat Diklat Teknis Fungsional pada Badiklat)	
139.	Kepala Bidang Pengendalian Sentra Pendidikan dan Pelatihan (Pusat Diklat Teknis Fungsional pada Badiklat)	
140.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Badan Pemulihan Aset)	
141.	Kepala Bagian Kerja Sama Pemulihan Aset dan Dukungan Teknis (Badan Pemulihan Aset)	
142.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan (Badan Pemulihan Aset)	
143.	Kepala Bidang Manajemen Pengelolaan Aset (Pusat Manajemen, Penelusuran, dan Perampasan Aset)	
144.	Kepala Bidang Penelusuran dan Perampasan Aset (Pusat Manajemen, Penelusuran, dan Perampasan Aset)	
145.	Kepala Bidang Penyelesaian Aset Tindak Pidana (Pusat Penyelesaian Aset)	
146.	Kepala Bidang Penyelesaian Aset Lainnya (Pusat Penyelesaian Aset)	
147.	Kepala Bagian Tata Usaha (Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum)	
148.	Kepala Bidang Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Intelijen, Pidana, dan Perdata dan Tata Usaha Negara (Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum)	
149.	Kepala Bidang Strategi Kebijakan Politik Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum)	
150.	Kepala Bagian Tata Usaha (Pusat Daskrimti)	
151.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal (Pusat Daskrimti)	
152.	Kepala Bidang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi (Pusat Daskrimti)	
153.	Kepala Bagian Tata Usaha (Pusat Penerangan Hukum)	

NO		NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1		2	3
	154.	Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum (Pusat Penerangan Hukum)	13
	155.	Kepala Bidang Media dan Kehumasan (Pusat Penerangan Hukum)	
	156.	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga (Pusat Penerangan Hukum)	
	157.	Kepala Bagian Tata Usaha (Pusat Kesehatan Yustisial)	
	158.	Kepala Bidang Operasional Layanan Kesehatan Yustisial (Pusat Kesehatan Yustisial)	
	159.	Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial (Pusat Kesehatan Yustisial)	
	160.	Kepala Bagian Tata Usaha (RS Adhyaksa)	
	161.	Kepala Bidang Pelayanan Medik (RS Adhyaksa)	
	162.	Kepala Bidang Penunjang Medik (RS Adhyaksa)	
	163.	Asisten Pembinaan (Kejaksaan Tinggi)	
	164.	Asisten Intelijen (Kejaksaan Tinggi)	
	165.	Asisten Tindak Pidana Umum (Kejaksaan Tinggi)	
	166.	Asisten Tindak Pidana Khusus (Kejaksaan Tinggi)	
	167.	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Kejaksaan Tinggi)	
	168.	Asisten Pidana Militer (Kejaksaan Tinggi)	
	169.	Asisten Pemulihan Aset (Kejaksaan Tinggi)	
	170.	Asisten Pengawasan (Kejaksaan Tinggi)	
	171.	Kepala Bagian Tata Usaha (Kejaksaan Tinggi)	12
	172.	Koordinator (Kejaksaan Tinggi)	12
D		JABATAN PENGAWAS	
	1.	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri	10
	2.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pembinaan)	
	3.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Pembinaan)	
	4.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Pembinaan)	
	5.	Kepala Subbagian Umum (Pembinaan)	
	6.	Kepala Subbagian Keuangan (Pembinaan)	
	7.	Kepala Subbagian Pengelolaan Data I (Biro Perencanaan)	
	8.	Kepala Subbagian Pengelolaan Data II (Biro Perencanaan)	

NO		NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1		2	3
	9.	Kepala Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja I (Biro Perencanaan)	10
	10.	Kepala Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja II (Biro Perencanaan)	
	11.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I (Biro Perencanaan)	
	12.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II (Biro Perencanaan)	
	13.	Kepala Subbagian Kelembagaan (Biro Perencanaan)	
	14.	Kepala Subbagian Tata Laksana (Biro Perencanaan)	
	15.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Perencanaan)	
	16.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Penguatan Reformasi Birokrasi (Biro Perencanaan)	
	17.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Internalisasi Program Reformasi Birokrasi (Biro Perencanaan)	
	18.	Kepala Subbagian Tata Usaha Jaksa Agung (Biro Umum)	
	19.	Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Jaksa Agung (Biro Umum)	
	20.	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli (Biro Umum)	
	21.	Kepala Subbagian Protokol dan Pengamanan Jaksa Agung (Biro Umum)	
	22.	Kepala Subbagian Protokol dan Pengamanan Wakil Jaksa Agung (Biro Umum)	
	23.	Kepala Subbagian Protokol dan Pengamanan Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan (Biro Umum)	
	24.	Kepala Subbagian Pengamanan Lingkungan dan Objek Khusus (Biro Umum)	
	25.	Kepala Subbagian Pengelolaan Senjata Api Dinas (Biro Umum)	
	26.	Kepala Subbagian Pengelolaan Rumah Tahanan Kejaksaan (Biro Umum)	
	27.	Kepala Subbagian Tata Tertib (Biro Umum)	
	28.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Persuratan (Biro Umum)	
	29.	Kepala Subbagian Pengelolaan Arsip (Biro Umum)	
	30.	Kepala Subbagian Pembinaan dan Evaluasi Kearsipan (Biro Umum)	
	31.	Kepala Subbagian Prasarana, Sarana, dan Fasilitas Khusus (Biro Umum)	
	32.	Kepala Subbagian Transportasi dan Kendaraan Dinas (Biro Umum)	
	33.	Kepala Subbagian Rumah Tangga (Biro Umum)	
	34.	Kepala Subbagian Fasilitas Kerohanian (Biro Umum)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
35.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Kepegawaian)	10
	36. Kepala Subbagian Data Kepegawaian (Biro Kepegawaian)	
	37. Kepala Subbagian Peraturan Kepegawaian (Biro Kepegawaian)	
	38. Kepala Subbagian Pengadaan Pegawai (Biro Kepegawaian)	
	39. Kepala Subbagian Jenjang Karier (Biro Kepegawaian)	
	40. Kepala Subbagian Kekayaan, Perizinan dan Pengembangan Jabatan Fungsional (Biro Kepegawaian)	
	41. Kepala Subbagian Kepangkatan dan Mutasi I (Biro Kepegawaian)	
	42. Kepala Subbagian Kepangkatan dan Mutasi II (Biro Kepegawaian)	
	43. Kepala Subbagian Kepangkatan dan Mutasi III (Biro Kepegawaian)	
	44. Kepala Subbagian Angka Kredit Jabatan Fungsional (Biro Kepegawaian)	
	45. Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun I (Biro Kepegawaian)	
	46. Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun II (Biro Kepegawaian)	
	47. Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun III (Biro Kepegawaian)	
	48. Kepala Subbagian Perbendaharaan I (Biro Keuangan)	
	49. Kepala Subbagian Perbendaharaan II (Biro Keuangan)	
	50. Kepala Subbagian Perbendaharaan III (Biro Keuangan)	
	51. Kepala Subbagian Pendapatan dan Piutang Negara I (Biro Keuangan)	
	52. Kepala Subbagian Pendapatan dan Piutang Negara II (Biro Keuangan)	
	53. Kepala Subbagian Pendapatan dan Piutang Negara III (Biro Keuangan)	
	54. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I (Biro Keuangan)	
	55. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II (Biro Keuangan)	
	56. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III (Biro Keuangan)	
	57. Kepala Subbagian Perjalanan Dinas (Biro Keuangan)	
	58. Kepala Subbagian Pengelolaan Gaji dan Tunjangan (Biro Keuangan)	
	59. Kepala Subbagian Penelitian Dokumen dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (Biro Keuangan)	
	60. Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Keuangan)	
	61. Kepala Subbagian Analisis Kebutuhan I (Biro Perlengkapan)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
62.	Kepala Subbagian Analisis Kebutuhan II (Biro Perlengkapan)	10
63.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi (Biro Perlengkapan)	
64.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Biro Perlengkapan)	
65.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Biro Perlengkapan)	
66.	Kepala Subbagian Penyimpanan dan Distribusi (Biro Perlengkapan)	
67.	Kepala Subbagian Penilaian (Biro Perlengkapan)	
68.	Kepala Subbagian Penghapusan (Biro Perlengkapan)	
69.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Perlengkapan)	
70.	Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan I (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
71.	Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan II (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
72.	Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
73.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
74.	Kepala Subbagian Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
75.	Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
76.	Kepala Subbagian Ekstradisi, Bantuan Hukum Timbal Balik dan Pemindahan Narapidana Antar Negara (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
77.	Kepala Subbagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
78.	Kepala Subbagian Perpustakaan (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
79.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
80.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
81.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Intelijen)	
82.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Intelijen)	
83.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Intelijen)	
84.	Kepala Subbagian Umum (Intelijen)	
85.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Intelijen)	
86.	Kepala Subbagian Perbendaharaan (Intelijen)	

NO		NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1		2	3
	87.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat I)	10
	88.	Kepala Seksi I.A.1 (Direktorat I)	
	89.	Kepala Seksi I.A.2 (Direktorat I)	
	90.	Kepala Seksi I.B.1 (Direktorat I)	
	91.	Kepala Seksi I.B.2 (Direktorat I)	
	92.	Kepala Seksi I.C.1 (Direktorat I)	
	93.	Kepala Seksi I.C.2 (Direktorat I)	
	94.	Kepala Seksi I.D.1 (Direktorat I)	
	95.	Kepala Seksi I.D.2 (Direktorat I)	
	96.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat II)	
	97.	Kepala Seksi II.A.1 (Direktorat II)	
	98.	Kepala Seksi II.A.2 (Direktorat II)	
	99.	Kepala Seksi II.B.1 (Direktorat II)	
	100.	Kepala Seksi II.B.2 (Direktorat II)	
	101.	Kepala Seksi II.C.1 (Direktorat II)	
	102.	Kepala Seksi II.C.2 (Direktorat II)	
	103.	Kepala Seksi II.D.1 (Direktorat II)	
	104.	Kepala Seksi II.D.2 (Direktorat II)	
	105.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat III)	
	106.	Kepala Seksi III.A.1 (Direktorat III)	
	107.	Kepala Seksi III.A.2 (Direktorat III)	
	108.	Kepala Seksi III.B.1 (Direktorat III)	
	109.	Kepala Seksi III.B.2 (Direktorat III)	
	110.	Kepala Seksi III.C.1 (Direktorat III)	
	111.	Kepala Seksi III.C.2 (Direktorat III)	
	112.	Kepala Seksi III.D.1 (Direktorat III)	
	113.	Kepala Seksi III.D.2 (Direktorat III)	
	114.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat IV)	
	115.	Kepala Seksi IV.A.1 (Direktorat IV)	
	116.	Kepala Seksi IV.A.2 (Direktorat IV)	
	117.	Kepala Seksi IV.B.1 (Direktorat IV)	

NO		NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1		2	3
	118.	Kepala Seksi IV.B.2 (Direktorat IV)	10
	119.	Kepala Seksi IV.C.1 (Direktorat IV)	
	120.	Kepala Seksi IV.C.2 (Direktorat IV)	
	121.	Kepala Seksi IV.D.1 (Direktorat IV)	
	122.	Kepala Seksi IV.D.2 (Direktorat IV)	
	123.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat V)	
	124.	Kepala Seksi V.A.1 (Direktorat V)	
	125.	Kepala Seksi V.A.2 (Direktorat V)	
	126.	Kepala Seksi V.B.1 (Direktorat V)	
	127.	Kepala Seksi V.B.2 (Direktorat V)	
	128.	Kepala Seksi V.C.1 (Direktorat V)	
	129.	Kepala Seksi V.C.2 (Direktorat V)	
	130.	Kepala Seksi V.D.1 (Direktorat V)	
	131.	Kepala Seksi V.D.2 (Direktorat V)	
	132.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Tindak Pidana Umum)	
	133.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Tindak Pidana Umum)	
	134.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Tindak Pidana Umum)	
	135.	Kepala Subbagian Umum (Tindak Pidana Umum)	
	136.	Kepala Subbagian Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Tindak Pidana Umum)	
	137.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Tindak Pidana Umum)	
	138.	Kepala Subbagian Perbendaharaan (Tindak Pidana Umum)	
	139.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat A)	
	140.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat A)	
	141.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat A)	
	142.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat A)	
	143.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penuntutan pada Direktorat A)	
	144.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penuntutan pada Direktorat A)	
	145.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Penuntutan pada Direktorat A)	

NO		NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1		2	3
	146.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat A)	10
	147.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat A)	
	148.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat A)	
	149.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat B)	
	150.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Prapenuntutan Direktorat B)	
	151.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Prapenuntutan Direktorat B)	
	152.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Prapenuntutan Direktorat B)	
	153.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penuntutan Direktorat B)	
	154.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penuntutan Direktorat B)	
	155.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Penuntutan Direktorat B)	
	156.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi Direktorat B)	
	157.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi Direktorat B)	
	158.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi Direktorat B)	
	159.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat C)	
	160.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat C)	
	161.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat C)	
	162.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat C)	
	163.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penuntutan pada Direktorat C)	
	164.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penuntutan pada Direktorat C)	
	165.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Penuntutan pada Direktorat C)	
	166.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat C)	
	167.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat C)	
	168.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat C)	
	169.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat D)	
	170.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat D)	
	171.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat D)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
172.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat D)	10
173.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penuntutan pada Direktorat D)	
174.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penuntutan pada Direktorat D)	
175.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Penuntutan pada Direktorat D)	
176.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat D)	
177.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat D)	
178.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat D)	
179.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat E)	
180.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat E)	
181.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat E)	
182.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat E)	
183.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penuntutan pada Direktorat E)	
184.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penuntutan pada Direktorat E)	
185.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Penuntutan pada Direktorat E)	
186.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat E)	
187.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat E)	
188.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat E)	
189.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Tindak Pidana Khusus)	
190.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Tindak Pidana Khusus)	
191.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Tindak Pidana Khusus)	
192.	Kepala Subbagian Umum (Tindak Pidana Khusus)	
193.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Tindak Pidana Khusus)	
194.	Kepala Subbagian Perbendaharaan (Tindak Pidana Khusus)	
195.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Penyidikan)	
196.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penyidikan)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
197.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penyidikan)	10
198.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penyidikan)	
199.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penyidikan)	
200.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penyidikan)	
201.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penyidikan)	
202.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penyidikan Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penyidikan)	
203.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penyidikan Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penyidikan)	
204.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Penyidikan Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penyidikan)	
205.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Penuntutan)	
206.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
207.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
208.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
209.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
210.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
211.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
212.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
213.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
214.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
215.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
216.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi)	10
217.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi)	
218.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi)	
219.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi)	
220.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi)	
221.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi)	
222.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi)	
223.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi)	
224.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi)	
225.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Pelanggaran HAM Berat)	
226.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penyidikan Pelanggaran HAM Berat pada Direktorat HAM Berat)	
227.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penyidikan Pelanggaran HAM Berat pada Direktorat HAM Berat)	
228.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penuntutan Pelanggaran HAM Berat pada Direktorat HAM Berat)	
229.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penuntutan Pelanggaran HAM Berat pada Direktorat HAM Berat)	
230.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran HAM Berat pada Direktorat HAM Berat)	
231.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran HAM Berat pada Direktorat HAM Berat)	
232.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Pengendalian Operasi)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
233.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Bantuan Teknis dan Tindakan Hukum Lain pada Direktorat Pengendalian Operasi)	10
234.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Bantuan Teknis dan Tindakan Hukum Lain pada Direktorat Pengendalian Operasi)	
235.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Layanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat pada Direktorat Pengendalian Operasi)	
236.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Layanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat pada Direktorat Pengendalian Operasi)	
237.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Monitoring dan Evaluasi pada Direktorat Pengendalian Operasi)	
238.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Monitoring dan Evaluasi pada Direktorat Pengendalian Operasi)	
239.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
240.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
241.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
242.	Kepala Subbagian Umum (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
243.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
244.	Kepala Subbagian Perbendaharaan (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
245.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Perdata)	
246.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Bantuan Hukum Penyelamatan pada Direktorat Perdata)	
247.	Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Bantuan Hukum Penyelamatan pada Direktorat Perdata)	
248.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Bantuan Hukum Pemulihan pada Direktorat Perdata)	
249.	Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Bantuan Hukum Pemulihan pada Direktorat Perdata)	
250.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Arbitrase pada Direktorat Perdata)	
251.	Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Arbitrase pada Direktorat Perdata)	
252.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Penegakan Hukum pada Direktorat Perdata)	
253.	Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Penegakan Hukum pada Direktorat Perdata)	
254.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Tata Usaha Negara)	
255.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Bantuan Hukum Tata Usaha Negara pada Direktorat Tata Usaha Negara)	

NO		NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1		2	3
	256.	Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Bantuan Hukum Tata Usaha Negara pada Direktorat Tata Usaha Negara)	10
	257.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Penyelenggaraan Pemerintahan pada Direktorat Tata Usaha Negara)	
	258.	Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Penyelenggaraan Pemerintahan pada Direktorat Tata Usaha Negara)	
	259.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Uji Materiil pada Direktorat Tata Usaha Negara)	
	260.	Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Uji Materiil pada Direktorat Tata Usaha Negara)	
	261.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Pelayanan Hukum pada Direktorat Tata Usaha Negara)	
	262.	Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Pelayanan Hukum pada Direktorat Tata Usaha Negara)	
	263.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Pertimbangan Hukum)	
	264.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Pendapat Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum)	
	265.	Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Pendapat Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum)	
	266.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Pendampingan dan Audit Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum)	
	267.	Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Pendampingan dan Audit Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum)	
	268.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum)	
	269.	Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum)	
	270.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pidana Militer)	
	271.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Pidana Militer)	
	272.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Pidana Militer)	
	273.	Kepala Subbagian Umum (Pidana Militer)	
	274.	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengamanan dan Pengawalan (Pidana Militer)	
	275.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Pidana Militer)	
	276.	Kepala Subbagian Perbendaharaan (Pidana Militer)	
	277.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Penindakan)	
	278.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penindakan Perkara Koneksitas pada Direktorat Penindakan)	
	279.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penindakan Perkara Koneksitas pada Direktorat Penindakan)	

NO		NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1		2	3
	280.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Koordinasi Penindakan pada Direktorat Penindakan)	10
	281.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Koordinasi Penindakan pada Direktorat Penindakan)	
	282.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Penuntutan)	
	283.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penuntutan Perkara Koneksitas pada Direktorat Penuntutan)	
	284.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penuntutan Perkara Koneksitas pada Direktorat Penuntutan)	
	285.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Koordinasi Penuntutan pada Direktorat Penuntutan)	
	286.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Koordinasi Penuntutan pada Direktorat Penuntutan)	
	287.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi)	
	288.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi)	
	289.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi)	
	290.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Koordinasi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi pada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi)	
	291.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Koordinasi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi pada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi)	
	292.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pengawasan)	
	293.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Pengawasan)	
	294.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Pengawasan)	
	295.	Kepala Subbagian Umum (Pengawasan)	
	296.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Pengawasan)	
	297.	Kepala Subbagian Perbendaharaan (Pengawasan)	
	298.	Kepala Subbagian Pengendalian Birokrasi (Pengawasan)	
	299.	Kepala Subbagian Pengendalian Aparatur Kejaksaan (Pengawasan)	
	300.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat I)	
	301.	Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Kepegawaian, Pemulihan Aset, dan Tugas Umum pada Inspektorat I)	
	302.	Pemeriksa Pemulihan Aset, Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Kepegawaian, Pemulihan Aset, dan Tugas Umum pada Inspektorat I)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
303.	Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat I)	10
304.	Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat I)	
305.	Pemeriksa Intelijen (Irmud Intelijen, Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer pada Inspektorat I)	
306.	Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer (Irmud Intelijen, Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer pada Inspektorat I)	
307.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat II)	
308.	Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Kepegawaian, Pemulihan Aset dan Tugas Umum pada Inspektorat II)	
309.	Pemeriksa Pemulihan Aset, Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Kepegawaian, Pemulihan Aset dan Tugas Umum pada Inspektorat II)	
310.	Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat II)	
311.	Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat II)	
312.	Pemeriksa Intelijen (Irmud Intelijen, Tindak Pidana Khusus, dan Pidana Militer pada Inspektorat II)	
313.	Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer (Irmud Intelijen, Tindak Pidana Khusus, dan Pidana Militer pada Inspektorat II)	
314.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat III)	
315.	Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Kepegawaian, Pemulihan Aset dan Tugas Umum pada Inspektorat III)	
316.	Pemeriksa Pemulihan Aset, Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Kepegawaian, Pemulihan Aset, dan Tugas Umum pada Inspektorat III)	
317.	Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat III)	
318.	Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat III)	
319.	Pemeriksa Intelijen (Irmud Intelijen, Tindak Pidana Khusus, dan Pidana Militer pada Inspektorat III)	
320.	Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer (Irmud Intelijen, Tindak Pidana Khusus, dan Pidana Militer pada Inspektorat III)	
321.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat Keuangan I)	
322.	Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud Keuangan I pada Inspektorat Keuangan I)	
323.	Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud Keuangan I pada Inspektorat Keuangan I)	
324.	Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud Keuangan II pada Inspektorat Keuangan I)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
325.	Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud Keuangan II pada Inspektorat Keuangan I)	10
326.	Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud Keuangan III pada Inspektorat Keuangan I)	
327	Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud Keuangan III pada Inspektorat Keuangan I)	
328.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat Keuangan II)	
329.	Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud Keuangan I pada Inspektorat Keuangan II)	
330.	Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud Keuangan I pada Inspektorat Keuangan II)	
331.	Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud Keuangan II pada Inspektorat Keuangan II)	
332.	Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud Keuangan II pada Inspektorat Keuangan II)	
333.	Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud Keuangan III pada Inspektorat Keuangan II)	
334.	Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud Keuangan III pada Inspektorat Keuangan II)	
335.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat Keuangan III)	
336.	Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud Keuangan I pada Inspektorat Keuangan III)	
337.	Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud Keuangan I pada Inspektorat Keuangan III)	
338.	Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud Keuangan II pada Inspektorat Keuangan III)	
339.	Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud Keuangan II pada Inspektorat Keuangan III)	
340.	Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud Keuangan III pada Inspektorat Keuangan III)	
341.	Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud Keuangan III pada Inspektorat Keuangan III)	
342.	Kepala Subbagian Program (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
343.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
344.	Kepala Subbagian Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan dan Penjaminan Mutu (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
345.	Kepala Subbagian Umum (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
346.	Kepala Subbagian Persuratan (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
347.	Kepala Subbagian Perlengkapan, Perpustakaan dan Dokumentasi (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
348.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	10
349.	Kepala Subbagian Perbendaharaan (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
350.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan)	
351.	Kepala Subbidang Perencanaan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan)	
352.	Kepala Subbidang Evaluasi (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan)	
353.	Kepala Subbidang Akademis (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan)	
354.	Kepala Subbidang Pengajaran (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan)	
355.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	
356.	Kepala Subbidang Perencanaan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	
357.	Kepala Subbidang Evaluasi (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	
358.	Kepala Subbidang Akademis (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	
359.	Kepala Subbidang Pengajaran (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	
360.	Kepala Subbidang Pengendalian Sentra Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	
361.	Kepala Subbidang Pengendalian Sentra Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	
362.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Badan Pemulihan Aset)	
363.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Badan Pemulihan Aset)	
364.	Kepala Subbagian Kerja Sama Pemulihan Aset (Badan Pemulihan Aset)	
365.	Kepala Subbagian Dukungan Teknis (Badan Pemulihan Aset)	
366.	Kepala Subbagian Umum (Badan Pemulihan Aset)	
367.	Kepala Subbagian Keuangan (Badan Pemulihan Aset)	
368.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Manajemen, Penelusuran, dan Perampasan Aset)	
369.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Penyelesaian Aset)	
370.	Kepala Subbagian Umum (Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
371.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	10
372.	Kepala Subbagian Umum (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
373.	Kepala Subbagian Keuangan (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
374.	Kepala Subbidang Pengelolaan Basis Data (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
375.	Kepala Subbidang Analisis Data dan Statistik Kriminal (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
376.	Kepala Subbidang Perangkat Lunak (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
377.	Kepala Subbidang Perangkat Keras dan Jaringan (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
378.	Kepala Subbagian Penyusunan Program, Laporan dan Pemantauan (Pusat Penerangan Hukum)	
379.	Kepala Subbagian Keuangan (Pusat Penerangan Hukum)	
380.	Kepala Subbagian Umum (Pusat Penerangan Hukum)	
381.	Kepala Subbidang Penerangan Hukum (Pusat Penerangan Hukum)	
382.	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum (Pusat Penerangan Hukum)	
383.	Kepala Subbidang Media Massa dan Media Sosial (Pusat Penerangan Hukum)	
384.	Kepala Subbidang Kehumasan (Pusat Penerangan Hukum)	
385.	Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah (Pusat Penerangan Hukum)	
386.	Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga Nonpemerintah (Pusat Penerangan Hukum)	
387.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pusat Kesehatan Yustisial)	
388.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan (Pusat Kesehatan Yustisial)	
389.	Kepala Subbagian Data dan Informasi (RS Adhyaksa)	
390.	Kepala Subbagian Keuangan (RS Adhyaksa)	
391.	Kepala Subbagian Umum (RS Adhyaksa)	
392.	Kepala Seksi Pelayanan Medik Umum, Spesialis dan Gawat Darurat (RS Adhyaksa)	
393.	Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan (RS Adhyaksa)	
394.	Kepala Seksi Forensik Klinik (RS Adhyaksa)	
395.	Kepala Seksi Penunjang Klinik (RS Adhyaksa)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
396.	Kepala Seksi Penunjang Non Klinik (RS Adhyaksa)	10
397.	Kepala Seksi Kefarmasian (RS Adhyaksa)	
398.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Kejaksaan Tinggi)	
399.	Kepala Subbagian Protokol dan Keamanan Dalam (Kejaksaan Tinggi)	
400.	Kepala Subbagian Kepegawaian (Kejaksaan Tinggi)	
401.	Kepala Subbagian Keuangan (Kejaksaan Tinggi)	
402.	Kepala Subbagian Umum (Kejaksaan Tinggi)	
403.	Kepala Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan (Kejaksaan Tinggi)	
404.	Kepala Subbagian Perencanaan (Kejaksaan Tinggi)	
405.	Kepala Seksi I (Intelijen Kejaksaan Tinggi)	
406.	Kepala Seksi II (Intelijen Kejaksaan Tinggi)	
407.	Kepala Seksi III (Intelijen Kejaksaan Tinggi)	
408.	Kepala Seksi IV (Intelijen Kejaksaan Tinggi)	
409.	Kepala Seksi V (Intelijen Kejaksaan Tinggi)	
410.	Kepala Seksi Penerangan Hukum (Intelijen Kejaksaan Tinggi)	
411.	Kepala Seksi A (Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi)	
412.	Kepala Seksi B (Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi)	
413.	Kepala Seksi C (Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi)	
414.	Kepala Seksi D (Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi)	
415.	Kepala Seksi Penyidikan (Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi)	
416.	Kepala Seksi Penuntutan (Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi)	
417.	Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi)	
418.	Kepala Seksi Pengendalian Operasi (Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi)	
419.	Kepala Seksi Perdata (Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi)	
420.	Kepala Seksi Tata Usaha Negara (Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi)	
421.	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum (Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi)	
422.	Kepala Seksi Penindakan (Pidana Militer Kejaksaan Tinggi)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
	423. Kepala Seksi Penuntutan (Pidana Militer Kejaksaan Tinggi)	10
	424. Kepala Seksi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi (Pidana Militer Kejaksaan Tinggi)	
	425. Kepala Subbidang Manajemen Pengelolaan Aset (Kejaksaan Tinggi)	
	426. Kepala Subbidang Penelusuran dan Perampasan Aset (Kejaksaan Tinggi)	
	427. Kepala Subbidang Penyelesaian Aset (Kejaksaan Tinggi)	
	428. Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum (Kejaksaan Tinggi)	
	429. Pemeriksa Intelijen (Kejaksaan Tinggi)	
	430. Pemeriksa Tindak Pidana Umum dan Pemulihan Aset (Kejaksaan Tinggi)	
	431. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer (Kejaksaan Tinggi)	
	432. Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Kejaksaan Tinggi)	
	433. Pemeriksa Keuangan (Kejaksaan Tinggi)	
	434. Kepala Subbagian Pembinaan (Kejaksaan Negeri)	
	435. Kepala Seksi Intelijen (Kejaksaan Negeri)	
	436. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kejaksaan Negeri)	
	437. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kejaksaan Negeri)	
	438. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kejaksaan Negeri)	
	439. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Kejaksaan Negeri)	
E	JABATAN PELAKSANA	
	1. Kepala Urusan Persuratan (Kejaksaan Tinggi)	8
	2. Kepala Urusan Distribusi dan Laporan (Kejaksaan Tinggi)	
	3. Kepala Urusan Protokol dan Pengamanan Pimpinan (Kejaksaan Tinggi)	
	4. Kepala Urusan Keamanan Dalam (Kejaksaan Tinggi)	
	5. Kepala Urusan Kepangkatan dan Mutasi Pegawai (Kejaksaan Tinggi)	
	6. Kepala Urusan Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai (Kejaksaan Tinggi)	
	7. Kepala Urusan Akuntansi dan Pelaporan (Kejaksaan Tinggi)	
	8. Kepala Urusan Anggaran, Perjalanan, Perbendaharaan, dan Pendapatan dan Piutang Negara (Kejaksaan Tinggi)	
	9. Kepala Urusan Rumah Tangga, Sarana Prasarana dan Kearsipan (Kejaksaan Tinggi)	
	10. Kepala Urusan Perlengkapan dan Barang Milik Negara (Kejaksaan Tinggi)	

NO		NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1		2	3
	11.	Kepala Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Kejaksaan Tinggi)	8
	12.	Kepala Urusan Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum (Kejaksaan Tinggi)	
	13.	Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Kejaksaan Negeri Tipe A)	
	14.	Kepala Urusan Perlengkapan (Kejaksaan Negeri Tipe A)	
	15.	Kepala Urusan Tata Usaha, Perpustakaan dan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Kejaksaan Negeri Tipe A)	
	16.	Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Kejaksaan Negeri Tipe B)	
	17.	Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan (Kejaksaan Negeri Tipe B)	
	18.	Kepala Subseksi I (Intelijen pada Kejaksaan Negeri)	
	19.	Kepala Subseksi II (Intelijen pada Kejaksaan Negeri)	
	20.	Kepala Subseksi Prapenuntutan (Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri)	
	21.	Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi (Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri)	
	22.	Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi (Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri)	
	23.	Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi (Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri)	
	24.	Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kejaksaan Negeri)	
	25.	Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum (Kejaksaan Negeri)	
	26.	Kepala Urusan Pembinaan (Cabang Kejaksaan Negeri)	
	27.	Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus dan Pemulihan Aset (Cabang Kejaksaan Negeri)	
	28.	Kepala Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara (Cabang Kejaksaan Negeri)	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN